

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN IMPOR BERAS TERHADAP PERMINTAAN DALAM NEGERI****Aliya Rizki**

Politeknik APP Jakarta

Citra Nirmala Pangesti

Politeknik APP Jakarta

Jl. Timbul No.34, RT.6/RW.5, Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Korespondensi: aliyaku1312@gmail.com

Abstrak. Rice import policy plays an important role in maintaining national food security in Indonesia, given that rice is a staple commodity for most people. This study aims to analyze the impact of rice import policy from an economic perspective on national food security. The analysis is conducted by analyzing changes in domestic rice supply and demand, price increases, and the influence of international trade policies on the local agricultural sector. In addition, this study also examines the role of rice imports in stabilizing rice prices in the domestic market, especially in the event of crop failures or production disruptions. The results show that rice import policy can provide short-term benefits in the form of price and supply stabilization, but on the other hand, it can weaken the incentives for local farmers to increase production. The implications of this policy should be carefully considered to achieve a balance between short-term food security and long-term sustainability of the agricultural sector. This study recommends the importance of a holistic policy that includes increasing local agricultural productivity, food diversification, and better management of national food reserves.

Keywords: Food Estate ; International Trade ; Impor

Abstrak. Kebijakan impor beras memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di Indonesia, mengingat beras adalah komoditas pokok bagi sebagian besar masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan impor beras dalam perspektif ekonomi terhadap ketahanan pangan nasional. Analisis dilakukan dengan menganalisis perubahan permintaan dan penawaran beras dalam negeri, kenaikan harga, serta pengaruh kebijakan perdagangan internasional terhadap sektor pertanian lokal. Selain itu, penelitian ini juga menelaah peran impor beras dalam menstabilkan harga beras di pasar domestik, terutama pada saat terjadinya gagal panen atau gangguan produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan impor beras dapat memberikan manfaat jangka pendek berupa stabilisasi harga dan pasokan, namun di sisi lain dapat melemahkan insentif bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi. Implikasi kebijakan ini harus dipertimbangkan secara hati-hati untuk mencapai keseimbangan antara ketahanan pangan jangka pendek dan keberlanjutan sektor pertanian dalam jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kebijakan yang holistik, meliputi peningkatan produktivitas pertanian lokal, diversifikasi pangan, dan manajemen cadangan pangan nasional yang lebih baik.

Kata Kunci: Impor ; Ketahanan Pangan ; Perdagangan Internasional

PENDAHULUAN

Dalam konteks ketahanan pangan nasional Indonesia, kebijakan impor beras merupakan salah satu topik strategis yang sering diperdebatkan. Dengan populasi negara yang terus meningkat, kebutuhan akan pangan, terutama beras sebagai makanan pokok, menjadi sangat penting. Sebaliknya, meskipun Indonesia memiliki potensi pertanian yang luar biasa, pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan impor sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Hal ini disebabkan oleh masalah

produksi domestik seperti fluktuasi produktivitas pertanian, keterbatasan lahan, dan perubahan iklim. Dalam sudut pandang ekonomi, kebijakan impor beras dapat memengaruhi keseimbangan neraca perdagangan, kesejahteraan petani, dan stabilitas harga. Di sisi lain, impor beras dilakukan untuk menjaga harga dalam negeri tetap stabil, terutama ketika produksi beras domestik tidak mencukupi. Namun, ada kekhawatiran tentang kebijakan ini karena ketergantungan terhadap pasar internasional, yang dapat memengaruhi kemandirian pangan nasional. Selain itu, subsidi dan dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian lokal, yang berdampak pada persaingan petani lokal di pasar beras domestik, sering dikaitkan dengan kebijakan impor beras.

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang menjadi fokus perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan impor beras memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan menjaga stabilitas harga. Beras sebagai komoditas utama di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sumber karbohidrat tetapi juga menjadi simbol ketahanan pangan nasional. Kebijakan impor beras seringkali menjadi sorotan, terutama ketika terjadi fluktuasi produksi dalam negeri akibat faktor-faktor seperti perubahan iklim, serangan hama, dan kebijakan pertanian yang kurang optimal. Di satu sisi, impor beras dapat membantu menjaga ketersediaan pangan dan mencegah lonjakan harga, tetapi di sisi lain, kebijakan ini juga memiliki potensi untuk memengaruhi sektor pertanian lokal dan ketahanan pangan jangka panjang.

Dalam jurnal ini, kami akan menganalisis pengaruh kebijakan impor beras terhadap permintaan dalam negeri. Melalui pendekatan analitis, diharapkan dapat diidentifikasi dampak positif dan negatif dari kebijakan ini serta rekomendasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan mendukung pertanian lokal. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antara kebijakan impor dan ketersediaan pangan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi yang lebih efektif dalam menjamin ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

KAJIAN TEORI

Teori keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo menyatakan bahwa suatu negara dapat memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dengan fokus pada barang yang memiliki efisiensi relatif lebih tinggi dibandingkan barang

lainnya. Keunggulan komparatif ini memungkinkan suatu negara untuk mengalokasikan sumber dayanya secara optimal meskipun tidak memiliki keunggulan absolut. Dalam konteks impor beras, Indonesia dapat mengandalkan negara-negara dengan keunggulan dalam produksi beras untuk memenuhi kebutuhan nasional, sementara sumber daya domestik dapat dialokasikan pada sektor lain yang lebih produktif, seperti industri manufaktur atau jasa. Teori ini juga diperkuat oleh empat faktor penentu keunggulan kompetitif yang dikemukakan oleh Porter, yaitu kondisi sumber daya (*factor condition*), strategi perusahaan dan persaingan domestik (*firm strategy, structure, and rivalry*), kondisi permintaan (*demand condition*), serta keberadaan industri pendukung (*related and supporting industry*). Keempat faktor ini memengaruhi kemampuan Indonesia dalam bersaing di pasar internasional sekaligus menjaga daya saing produksi lokal.

Adam Smith, melalui teori tangan tak terlihat, menjelaskan bahwa pasar bebas akan bekerja optimal jika pemerintah meminimalkan intervensi. Dalam hal ini, kebijakan impor beras dapat membantu menciptakan keseimbangan pasar dengan menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga. Namun, ketergantungan terhadap mekanisme pasar internasional dapat menimbulkan risiko, terutama jika terjadi gangguan dalam rantai pasokan global. Oleh karena itu, kebijakan impor beras harus diterapkan secara hati-hati untuk mencegah dampak negatif terhadap sektor pertanian lokal dan kemandirian pangan nasional.

Ketahanan pangan, sebagaimana didefinisikan oleh FAO (2006), adalah kemampuan setiap individu untuk memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi setiap saat. Dalam hal ini, impor beras menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga pasokan pangan nasional, terutama ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi. Namun, bergantung terlalu besar pada impor dapat membahayakan petani lokal karena harga beras impor yang lebih rendah dapat menekan harga beras domestik. Penelitian oleh Rusastra et al. (2007) menunjukkan bahwa kebijakan impor dapat berdampak negatif pada kesejahteraan petani kecil, meskipun konsumen diuntungkan oleh harga yang lebih stabil dan terjangkau.

Pada skala makro, impor beras memiliki peran penting dalam menjaga inflasi pangan tetap terkendali. Studi oleh World Bank (2013) menegaskan bahwa stabilitas harga pangan, termasuk beras, sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro di negara berkembang seperti Indonesia, di mana sebagian besar penduduk mengalokasikan

sebagian besar pendapatan untuk kebutuhan pangan. Sejak tahun 1970-an, kebijakan impor beras di Indonesia telah diterapkan sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan produksi domestik, terutama ketika terjadi gagal panen akibat faktor perubahan iklim atau musibah alam seperti El Niño (Simatupang et al., 1999). Namun, penelitian oleh Sudaryanto dan Saliem (2011) mengingatkan bahwa ketergantungan pada impor dapat mengancam kemandirian pangan nasional dan mengurangi daya saing sektor pertanian lokal.

Dengan demikian, penerapan kebijakan impor beras harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek untuk menjaga ketersediaan pangan dengan upaya jangka panjang dalam memperkuat sektor pertanian domestik. Pendekatan yang holistik diperlukan agar kebijakan ini tidak hanya mengatasi permasalahan sementara, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis kebijakan impor beras di Indonesia, dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder tanpa melibatkan wawancara. Sumber data meliputi dokumen resmi pemerintah seperti kebijakan dari Kementerian Pertanian dan Badan Urusan Logistik (Bulog), laporan tahunan terkait ketahanan pangan, serta artikel akademik dan penelitian terdahulu yang relevan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan dokumen resmi dan studi pustaka untuk mendapatkan konteks yang lebih luas mengenai kebijakan impor beras. Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait produksi, konsumsi, dan harga beras juga akan dikumpulkan untuk mendukung analisis. Dengan cara ini, analisis akan mencakup dampak terhadap petani lokal, konsumen, dan stabilitas harga. Metodologi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak kebijakan impor beras di Indonesia serta tantangan dalam mencapai ketahanan pangan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis analisis data yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), Pada 2023 luas panen padi diperkirakan sebesar

10,20 juta hektare dengan produksi padi sekitar 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG). Produksi beras diperkirakan sebesar 30,90 juta ton pada tahun 2023 jika dihitung berdasarkan konsumsi beras penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mampu menjadi produsen beras yang cukup besar. Akan tetapi hal tersebut belum dapat menekan ketergantungan impor beras Indonesia terhadap negara lain yakni seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, dll. Secara geografis, Indonesia merupakan negara agraris dengan lahan pertanian yang luas serta kualitas tanah yang subur. Jika merujuk pada fakta tersebut, Indonesia semestinya mampu melakukan swasembada pangan karena memiliki potensi lahan agraris yang melimpah. Tetapi, pemanfaatan potensi lahan ini tidak akan memberikan dampak positif jika belum dimanfaatkan secara maksimal. Hingga saat ini pemerintah Indonesia masih berupaya untuk menghentikan keran impor terhadap negara lain mengingat kebutuhan pangan di Indonesia semakin meningkat.

Tahun	Produksi	produktivitas	luas panen
2019	54.604.033,34	51.14	10.677.887,1
2020	54.649.202,24	51.28	10.657.274,96
2021	54.415.294,22	52.26	10.411.801,22
2022	54.748.977,00	52.38	10.452.672,00
2023	53.980.993,19	52.85	10.213.705,17

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

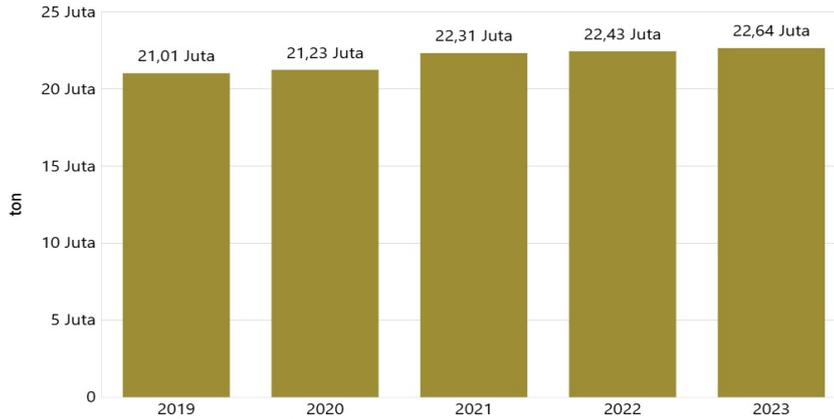
Gambar 1. Perkembangan Produksi Padi di Indonesia

Meskipun lahan panen tampak terjadi pengurangan, Produksi padi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 54,64 ton GKG yang mana di tahun tersebut menjadi tahun terbesar dari produksi dalam kurun waktu 5 tahun kebelakang. Akan tetapi pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi yang signifikan sebesar

-1,40% juta ton GKG, hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan beras dalam negeri serta memicu kenaikan harga seiring dengan permintaan pasar dan konsumsi masyarakat pada beras yang semakin meningkat. Mengingat pertumbuhan jumlah penduduk memberikan pengaruh terhadap ketersediaan bahan pangan dan produksi pangan nasional, ketika kapasitas produksi terbatas namun permintaan terus meningkat akan mengakibatkan distribusi pangan yang tidak terpenuhi secara menyeluruh sehingga akan menimbulkan kekhawatiran jika produksi nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Jika melihat frekuensi permintaan pasar, masyarakat Indonesia memiliki ketergantungan

yang tinggi terhadap beras terlebih beras dikenal sebagai makanan pokok sehari-hari masyarakat Indonesia. Jumlah permintaan akan terus meningkat sementara jumlah produksi nasional nilainya berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan hingga di tahun 2023. Hal ini dapat dipengaruhi akibat dari berkurangnya lahan panen yang telah dialih fungsikan menjadi lahan industri atau kawasan pemukiman, hal inilah yang mendorong pemerintah melalui kementerian perdagangan dan bulog melakukan kebijakan impor beras untuk menutupi kekurangan pasokan di dalam negeri (Arifin, 1997) meskipun secara historis Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut adalah dengan mengoptimalkan kebijakan terhadap produktivitas melalui inovasi teknologi, investasi pembangunan prasarana dan irigasi, subsidi dan pengadaan sarana produksi, kebijakan harga dan tata-niaga beras, serta penyediaan kredit bersubsidi, (Rosegrant et al 1998). Harga memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas impor di Indonesia. Ketika impor dilakukan dalam jumlah besar, harga beras cenderung tetap stabil. Namun, impor yang berlebihan beresiko menekan harga beras lokal, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan petani domestik. Oleh karena itu, terdapat hubungan erat antara harga dan volume impor beras, dimana perubahan harga dapat mempengaruhi keputusan mengenai kebijakan impor. Secara kumulatif, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga nasional selama 2019-2023 sudah naik 7,7%. Selama periode tersebut konsumsi beras secara per kapita juga meningkat. Menurut Bapanas, konsumsi beras per kapita Indonesia pada tahun 2019 tetap 78,71 kg per tahun. Mankiw (2007), mendefinisikan konsumsi sebagai pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Tingkat konsumsi beras yang semakin tinggi akan meningkatkan kenaikan terhadap permintaan beras sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan beras (Tangkudung dkk, 2016).



Sumber : Data Books (2024)

Gambar 2. Data Konsumsi Beras untuk Kebutuhan Rumah Tangga

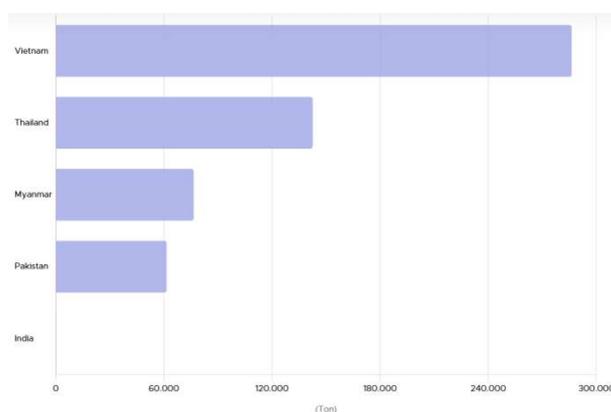
Konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan siap pakai atau disposable income yang menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan. konsumsi beras per kapita Indonesia tergolong tinggi dibanding negara lain. Pertumbuhan penduduk yang meningkat secara pesat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menyebabkan permintaan terhadap beras semakin meningkat. Kebiasaan masyarakat yang menganggap ketika mengkonsumsi nasi dapat dikatakan sudah makan meskipun dapat disubstitusi oleh karbohidrat lain hal ini juga dapat meningkatkan permintaan beras (Yusuf dkk, 2018). Tinggi nya pertumbuhan penduduk seiring dengan meningkatnya konsumsi beras membuat permintaan beras semakin meningkat sehingga hal tersebut belum dapat terwujud karena peningkatan produksi beras dimaksudkan untuk mengimbangi meningkat nya jumlah penduduk dan permintaan setiap kebutuhan rumah tangga.



Sumber: Data Tempo (2023)

Gambar 2: Tren Kenaikan Harga Beras dari Tahun 2019-2023

Kenaikan harga beras di Indonesia telah menjadi isu penting dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data dari PIHPS Nasional, harga beras dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan signifikan di berbagai jenis kualitas. Kondisi ini memberikan efek pada rutinitas masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada beras sebagai sumber utama karbohidrat. Menurut laporan dari *Tempo.co*, Ombudsman RI mengidentifikasi tiga faktor utama yang menyebabkan lonjakan harga beras: permasalahan iklim, hulu, dan hilir. Meski demikian, Ombudsman menilai bahwa dampak perubahan iklim tidak terlalu signifikan, karena kekurangan produksi di satu wilayah masih dapat diatasi dengan suplai dari daerah lain. Menurut laporan dari *Tempo.co*, Ombudsman RI mengidentifikasi tiga faktor utama yang menyebabkan lonjakan harga beras: permasalahan iklim, hulu, dan hilir. Meski demikian, Ombudsman menilai bahwa dampak perubahan iklim tidak terlalu signifikan, karena kekurangan produksi di satu wilayah masih dapat diatasi dengan suplai dari daerah lain. Dalam kondisi ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk merumuskan solusi kebijakan efektif guna mengatasi kenaikan harga beras. Upaya tersebut dapat mencakup peningkatan produksi, pengendalian biaya produksi, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terdampak kenaikan harga bahan pokok ini. Peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan nasional adalah salah satu efek dari kebijakan impor saat ini. Namun, kebijakan ini juga berpotensi mempengaruhi indikator kebutuhan pangan yang diharapkan pemerintah, dimaksudkan untuk kemakmuran petani pangan. Peningkatan ketersediaan makanan di pasar dalam negeri akibat impor dapat menyebabkan penurunan harga, terutama jika peningkatan pasokan tidak diimbangi dengan pertumbuhan permintaan yang sebanding.



Sumber: Good Stats (2024)

Gambar 3: Volume Impor Beras Indonesia Maret 2024

Perubahan dalam pola konsumsi masyarakat terhadap beras menunjukkan tren yang semakin kompleks seiring dengan perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen. Tingkat ketergantungan penduduk Indonesia terhadap beras cukup tinggi, yang dapat menimbulkan masalah serius jika terjadi kelangkaan. Kelangkaan beras berpotensi mengancam pasokan pangan nasional. Impor beras menjadi salah satu solusi untuk menjaga kestabilan ketersediaan beras di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah produksi beras domestik belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, impor beras dapat dilakukan jika penyediaan pangan dalam negeri tidak mencukupi. Namun, meskipun produksi beras domestik mengalami surplus dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, impor tetap dilaksanakan. Tujuan dari impor beras ini adalah untuk menciptakan surplus pasokan (*excess supply*), sehingga harga beras dapat terjaga dan stabil (Paipan dan Abrar, 2020).

Fluktuasi harga ini bukan hanya mempengaruhi berkurangnya penghasilan petani, melainkan juga dapat mempengaruhi keputusan petani agar tetap menanam tanaman pangan atau bahkan memperluas skala produksinya. Beberapa pemerintah mengelola distribusi beras dengan aturan seperti bea masuk, izin impor, dan pembatasan impor guna menjaga kemakmuran petani serta menjaga ketahanan pangan dalam negeri (Carolina & Sirait, 2018). Petani padi dianggap sejahtera apabila selisih antara biaya produksi dan hasil penjualan cukup besar, atau ketika pendapatan dari penjualan melebihi biaya produksi dan konsumsi. Dengan demikian, pendapatan petani pangan akan meningkat jika dibandingkan dengan pengeluarannya.

Impor beras merupakan salah satu penyebab turunnya harga beras lokal. Pada Maret 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia mengimpor 567,22 ribu ton beras, jumlah ini meningkat sebesar 29,29% dibandingkan periode sebelumnya. Beras impor tersebut berasal dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Kebijakan impor beras ini erat kaitannya dengan hubungan antarnegara yang saling bergantung, di mana jaringan perdagangan global memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan masing-masing negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Ketergantungan antarnegara telah menjadi hal yang umum dalam era globalisasi. Namun, di balik manfaatnya, kebijakan impor beras juga membawa dampak negatif, khususnya bagi petani lokal yang mengalami kerugian akibat turunnya harga beras domestik. Hal ini

mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan nasional dan perlindungan terhadap sektor pertanian lokal.

SARAN

Berdasarkan analisis komprehensif tentang dinamika produksi dan konsumsi beras di Indonesia, pemerintah disarankan untuk melakukan intervensi multidimensi yang mencakup optimalisasi lahan pertanian melalui inovasi teknologi pertanian mutakhir, investasi berkelanjutan pada infrastruktur irigasi dan prasarana pertanian, serta pengembangan kebijakan subsidi yang tepat sasaran. Kebijakan ini perlu dirancang secara sistematis untuk melindungi kepentingan petani lokal sambil memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, dengan memperhatikan mekanisme regulasi impor beras yang proporsional dan perlindungan harga beras domestik.

Penelitian lanjutan perlu difokuskan pada pengembangan varietas padi unggul, sistem pertanian cerdas iklim, dan model pendanaan inovatif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Penguatan kelembagaan dan koordinasi antar sektor pemerintahan dalam mengelola rantai pasok pangan menjadi krusial, yang mencakup pengembangan sistem informasi pertanian terintegrasi, mendorong partisipasi aktif petani dalam pengambilan kebijakan, serta membangun infrastruktur distribusi yang efisien. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pertanian berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendorong kemandirian ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Khasanah, N. N., & Gunanto, E. Y. A. (2024). Pengaruh Luas Panen Padi, Produktivitas Lahan, Pertumbuhan Harga Beras dan Jumlah Penduduk terhadap Ketersediaan Beras di Indonesia tahun 1990-2022. *Diponegoro Journal of Economics*, 13(2), 67-79.
- Ariska, F. M., & Qurniawan, B. (2021). Perkembangan impor beras di Indonesia. *Journal of Agriculture and Animal Science*, 1(1), 27-34.
- Matondang, K. A., Sitio, F. M., Lahagu, P. H., & Hasibuan, M. R. F. (2024). PERBANDINGAN TEORETIS KEUNGGULAN ABSOLUT DAN KEUNGGULAN KOMPARATIF: IMPLIKASI BAGI KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 506-

519.

- Juliashar, F., Tatimah, K., Abiyah, N. A. S., & Wikansari, R. (2024). PENGARUH IMPOR BERAS ASAL THAILAND DAN VIETNAM TERHADAP KESTABILAN HARGA BERAS DI INDONESIA. *AGRORADIX: Jurnal Ilmu Pertanian*, 7(2), 1-11.
- Kusumastuti, A. I., Indriani, S. A., & Febriyani, T. (2024). Dampak Maraknya Impor Beras di Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir terhadap Kesejahteraan Petani Padi. *JINTAN: Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional*, 4(1), 78-88.
- Aziza, L., Zidan, M., Oktavia, T., & Febriansyah, F. (2024). Dampak Kebijakan Impor Beras terhadap Petani Lokal Jember. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1), 345-350.
- Akbar, R. M. J. I., Putri, V. Z. R., Arifah, N. A., Wikarsa, O. G., & Ramadhan, R. J. (2023). Krisis ketahanan pangan penyebab ketergantungan impor tanaman pangan di Indonesia. *AZZAHRA: Scientific Journal of Social and Humanities*, 1(2), 73-81.
- Djaafar, A., & Djaafar, D. (Tahun). "Faktor - faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia Tahun 2001 - 2019" *E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter* Vol.9. No.3